

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menguji teori asas pengelolaan keuangan desa, yang disebutkan oleh Riant Nugroho & Firre An Suprapto (2021) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, teori pembangunan infrastruktur desa, yang disebutkan oleh Rahardjo Adisasmita (2018) dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, mencakup perencanaan pembangunan infrastruktur, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengawasan pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat, evaluasi pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kepustakaan dan studi lapangan (observasi, kuesioner) digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan APBDes terhadap pembangunan infrastruktur desa, menggunakan uji-t dan program SPSS 25. Hasil uji-T t hitung  $4,420 > t$  tabel 4,303 menunjukkan bahwa dimensi transparansi (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa (Y). Hasil uji-T t hitung  $4,594 > t$  tabel 4,303 menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa (Y). Hasil uji-T t hitung  $4,576 > t$  tabel 4,303 menunjukkan bahwa dimensi partisipatif (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa (Y). Hasil uji-T t hitung  $4,512 > t$  tabel 4,303 menunjukkan bahwa dimensi tertib dan disiplin anggaran (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa (Y). Menurut perhitungan, sebanyak 78,3% merupakan hasil dari koefisien determinasi pengaruh pengelolaan APBDes terhadap pembangunan infrastruktur desa, Sementara sisanya berjumlah 21,7% dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh peneliti.

**Kata Kunci : Pengelolaan APBDes, Pembangunan Infrastruktur Desa**

## **ABSTRACT**

*This research tests the basic theory of village financial management, mentioned by Riant Nugroho & Firre An Suprapto (2021) and Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 related to Village Financial Management, which includes transparency, accountability, participatory, and budgetary order and discipline. Apart from that, the theory of village infrastructure development, mentioned by Rahardjo Adisasmita (2018) and Government Regulation Number 43 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014, includes infrastructure development planning, implementation of infrastructure development, supervision of infrastructure development, community participation, evaluation development. Literature research and field studies (observations, questionnaires) were used to collect data. T-test results t calculated  $4.420 > t$  table 4.303 show that the transparency dimension (X1) has a significant influence on village infrastructure development (Y). T-test results t calculated  $4.594 > t$  table 4.303 show that the accountability dimension (X2) has a significant influence on village infrastructure development (Y). T-test results t calculated  $4.576 > t$  table 4.303 show that the participatory dimension (X3) has a significant influence on village infrastructure development (Y). T-test results t calculated  $4.512 > t$  table 4.303 show that the orderly and disciplined budget dimensions (X4) have a significant influence on village infrastructure development (Y). According to calculations, as much as 78.3% is the result of the coefficient of determination of the influence of APBDes management on village infrastructure development, while the remaining 21.7% is influenced or caused by other variables not explained by the researchers.*

**Keywords:** *Village APBDes Management, Village Infrastructure Development*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG